

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Batang

Halaman 6

Pemkab Batang Langganan WTP

SEMARANG – Untuk ketiga kalinya Pemkab Batang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. “Ini WTP yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran (TA) 2016, 2017 dan tahun 2018. Prestasi ini kita raih berkat kerja keras seluruh jajaran. Terutama dalam pengelolaan aset,” ujar Bupati Wihaji usai menerima. Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2018 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali di Aula kantor BPK RI Perwakilan Jateng, Jumat (17/5)

Predikat WTP merupakan apresiasi pemerintah atas kerja keras jajaran ASN Pemkab Batang dan DPRD mengelola keuangan dan aset secara transparan dan akuntabel. Predikat opini WTP dari BPK RI menjadi kebanggaan dan prestasi bersama. “Semangat kita membangun pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Catatan penting dari BPK RI segera kita tindaklanjuti. Kita juga apresiasi para ASN, DPRD yang selama ini sebagai pelaksana teknis penggunaan keuangan daerah,” jelas Wihaji.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Ayub Amali mengatakan, Pemkab Batang berhasil meraih dan mempertahankan WTP. Namun, dari hasil pemeriksaan, ada catatan yang harus ditindak lanjuti. “Catatan kami, terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan, aset dan perlu adanya pelatihan bagi guru,” beber Ayub Amali.

Selain itu, aset Pasar Bandar untuk segera diselesaikan. Adapun catatan lainnya yaitu kekurangan volume Rp 258 juta, jaminan pelaksanaan yang tidak bisa diselesaikan yang totalnya Rp 510 juta, dan denda Rumah Sakit Rp 306 juta juga harus diselesaikan. Yang perlu ditertibkan juga pengelolaan pendapatan air tanah dan pengelolaan pendapatan reklame. “WTP bukan hadiah dari BPK RI, tapi buah kerja keras dari Bupati dan DPRD serta jajarannya yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai regulasi,” imbuhnya. **(edo/dik)**